

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Grand Teori

2.1.1. Teori Harapan (*Expectancy Theory*)

Teori ekspektansi menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Dalam hal yang lebih praktis, para pekerja akan mengarahkan pada penilaian kinerja yang baik yang akan mengarahkan pada imbalan organisasi, misalnya peningkatan gaji dan atau imbalan secara intrinsik, dan bahwa imbalan akan memuaskan tujuan pribadi para pekerja. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (Robbins dan Judge, 2015). Teori harapan atau *Expectancy Theory of Motivation* yang dikemukakan oleh Victor H. Vroom pada tahun 1964 memiliki tiga asumsi yaitu :

a. Harapan hasil (*outcome expectancy*)

Harapan hasil memiliki artian bahwa hasil akan dapat dicapai dengan adanya perlakuan tertentu dari seseorang yang mengharapkan hasil tersebut.

b. Valensi (*valence*)

Valensi memiliki artian bahwa terdapat nilai yang akan orang berikan kepada hasil yang diharapkan karena setiap hasil atau capaian itu memiliki nilai bagi individu.

c. Harapan usaha (*effort expectancy*)

Harapan usaha memiliki artian bahwa terdapat usaha dari seseorang dalam pencapaian suatu hasil tertentu, karena setiap capaian itu berkaitan dengan seberapa sulit mencapainya.

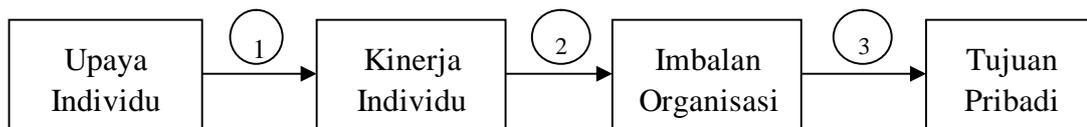
Vroom dalam Hubeis (2013) menyatakan bahwa individu termotivasi untuk melakukan hal tertentu guna pencapaian tujuan apabila meyakini bahwa tindakan tersebut akan mencapai tujuan tersebut.

Teori harapan didasarkan pada :

- Harapan (*Expectancy*) merupakan kesempatan yang ada akan kejadian karena suatu tindakan atau penilaian bahwa upaya yang dilakukan akan berdampak pada kinerja yang diharapkan.
- Nilai (*Valence*) adalah dampak yang ditimbulkan dari perilaku itu memiliki nilai tertentu bagi individu yang bersangkutan, atau dapat dikatakan bahwa nilai adalah hasil dari keinginan seseorang yang dikaitkan dengan individu dengan hasil yang diharapkan.

Pertautan (*Instrumentality*) merupakan persepsi yang timbul dari individu mengenai hasil pada tingkat pertama ekspektansi merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu karena adanya keinginan untuk pencapaiannya yang akan berdampak pada penghargaan.

Teori Ekspektansi:



Menurut Robbins dan Judge (2015), teori ekspektansi membantu dalam menjelaskan mengapa banyak pekerja tidak termotivasi pada pekerjaan mereka dan hanya melakukan usaha yang minimum untuk memperolehnya. Ada pertanyaan dari pekerja yang perlu dijawab jika ingin memaksimalkan motivasi.

Pertama, “jika saya memberikan upaya yang maksimal, akankah diakui dalam penilaian kinerja saya?” Bagi banyak pekerja, jawabannya adalah “tidak” mengapa? Ini dikarenakan tingkat keahlian mereka kurang, yang mana berarti bahwa tidak peduli seberapa kerasnya mereka berusaha, mereka tidak akan memiliki kinerja yang tinggi. Sistem penilaian kinerja organisasi

dirancang untuk menilai faktor yang bukan kinerja seperti misalnya loyalitas, inisiatif, atau keberanian, yang mana artinya lebih banyak usaha tidak lantas menghasilkan evaluasi yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa orang hanya akan termotivasi apabila mereka memandang ada kaitan antara upaya dengan kinerja mereka.

Kedua, “jika saya memperoleh penilaian kinerja yang baik, akankah mengarahkan pada imbalan organisasi?”. Banyak imbalan organisasi di samping kinerja, didasarkan pada faktor-faktor lain misalnya senioritas, dapat bekerja sama para pekerja cenderung untuk melihat hubungan kinerja-imbalan lemah dan tidak termotivasi karenanya.

Terakhir, “jika saya diberikan imbalan, apakah imbalan tersebut menarik bagi saya?”. Pekerja bekerja keras tidak hanya dengan harapan akan memperoleh promosi tetapi juga memperoleh kenaikan gaji. Atau pekerja menginginkan pekerjaan yang lebih menarik dan menantang tetapi hanya sedikit menerima pujian. Sayangnya, banyak pimpinan terbatas pada imbalan yang didistribusikan, yang mana menyulitkan untuk menyesuaikan imbalan terhadap kebutuhan pekerja. Beberapa asumsi yang tidak benar bahwa seluruh pekerja menginginkan hal yang sama, sehingga mengabaikan efek motivasi atas diferensiasi imbalan. Model ini menyatakan bahwa tingkat usaha individu (motivasi) bukan hanya merupakan fungsi dari penghargaan, pegawai juga harus mempunyai kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan juga harus menghargai penghargaan tersebut, juga menekankan bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu di motivasi.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor privat adalah untuk memaksimalkan laba dan mencapai tujuan organisasi. Menurut Tambunan (2016) kinerja seorang pegawai akan baik, jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan/upah yang layak dan mempunyai harapan masa depan. Untuk mewujudkan hal tersebut organisasi akan berupaya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan merekrut pegawai dengan kompetensi yang memadai, kemudian dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan motivasi

yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan komitmen dalam bekerja dan memberikan perangkat kerja yang meningkatkan produktifitas kerja. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kinerja karyawan akan meningkat yang nantinya juga akan meningkatkan kinerja organisasi.

2.1.2. Human Capital Theory

Human Capital Theory dikembangkan oleh Becker (1965) yang mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan human capital adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk modal lainnya. *Human Capital Theory* berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan kapitas belajar dan produksinya.

Human Capital Theory adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat di definisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.

Implikasi *Human Capital Theory* dalam penelitian ini adalah teori ini digunakan sebagai landasan teori untuk menjelaskan bagaimana tingkat pendidikan pemilik dapat berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.

2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia telah mendefinisikan UMKM kedalam SAK EMKM yang telah disusun. Pengertian dari UMKM adalah sebagai berikut:

“Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa tanggung jawab publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar

Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang mendefinisikan dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. setidaknya selama dua tahun berturut-turut” (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

“Usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

2) Usaha Kecil

“Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan juga bukan merupakan bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.

3) Usaha Menengah

“Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, serta tidak menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

2.2.1. Kriteria UMKM

Menurut Undang –Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, setiap UMKM memiliki beberapa klasifikasi dalam pengelompokkannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih maksimal adalah Rp50.000.000,00.- tidak termasuk aset tanah maupun bangunan dan memiliki omzet penjualan per tahun maksimal Rp.300.000.000,00.-

2) Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.- tidak termasuk aset tanah maupun bangunan dan memiliki omzet penjualan per tahun dari Rp300.000.000,00.- sampai dengan Rp2.500.000.000,00.-

3) Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih dari Rp500.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000.000,- tidak termasuk aset tanah maupun bangunan dan memiliki omzet per tahun dari Rp2.500.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000.000,00.-

2.2.2. Asas dan Tujuan UMKM

Didalam pembentukan UMKM terdapat asas yang mendasari kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh UMKM itu sendiri. Menurut Undang –Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa:

1) Asas

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi Ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi Berkeadilan
- e. Berkelanjutan

- f. Kemandirian
- g. Keseimbangan Kemajuan
- h. Kesatuan Ekonomi Nasional

2) Tujuan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.2.3. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM

Berikut jenis-jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Nayla (2015):

1. UMKM di Bidang Perdagangan

UMKM di bidang perdagangan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni UMKM retail (eceran) dan UMKM grosir (besar).

2. UMKM di Bidang Industri

Berdasarkan proses produksinya, UMKM di bidang industri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu UMKM pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, UMKM pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dan UMKM pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.

3. UMKM di Bidang Jasa

UMKM di bidang jasa merupakan jenis UMKM yang bergerak dalam bidang penjualan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis UMKM ini memiliki ciri khas bahwa produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak berwujud dan hanya bisa dirasakan manfaatnya.

4. UMKM di Bidang Agraris

UMKM di bidang agraris merupakan jenis UMKM yang bergerak dalam bidang pengolahan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga bisa memberikan manfaat atau mendatangkan keuntungan. Berdasarkan lapangan usahanya, UMKM di bidang agraris dapat

dibedakan menjadi empat jenis, yaitu UMKM perkebunan, UMKM peternakan, UMKM pertanian, dan UMKM perikanan.

5. UMKM di Bidang Ekstraktif

UMKM di bidang ekstraktif merupakan jenis UMKM yang bergerak dalam bidang pengambilan hasil alam secara langsung, baik dengan mengubah bentuk dan zatnya maupun tidak. Berdasarkan proses kerjanya, UMKM di bidang ekstraktif ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu UMKM penambangan kayu, dan UMKM penambangan.

2.2.4. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015), peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang besar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasarbaru dan sumber inovasi.
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

2.3. Wawasan tentang SAK EMKM

2.3.1. SAK EMKM

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk diterapkan pada entitas kecil maupun entitas menengah. Kemudian, DSAK IAI menerbitkan kembali standar terbaru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM memuat peraturan akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP karena mengatur transaksi yang dilakukan oleh EMKM dengan pengukuran yang menggunakan biaya

historis. SAK EMKM diharapkan dapat digunakan bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan sumber pendanaan (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, 2016).

Oleh karena itu, DSAK IAI melakukan pengembangan dalam hal standar akuntansi. Standar akuntansi yang baru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi industri, regulator, serta pihak –pihak yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK dan dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan *Exposure Draft* SAK EMKM dan akan berlaku efektif per 1 Januari 2018 sebagai upaya untuk mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM dan dasar pengakuannya menggunakan biaya historis.

SAK EMKM ini bisa digunakan suatu entitas maupun usaha yang kriterianya memenuhi dari kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Didalam SAK-EMKM, laporan keuangan disusun menggunakan asumsi basis accrual dan kelangsungan usaha

2.3.2. Kebijakan Akuntansi SAK EMKM

1) Pengakuan

Dalam bab 2 poin 12, SAK EMKM menjelaskan bahwa pencatatan unsur-unsur laporan keuangan adalah proses pembuatan akun didalam laporan posisi keuangan atau didalam laporan laba rugi yang sesuai dengan definisi unsur sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 poin 2 dan 2.8 dan memenuhi kriteria berikut:

- a. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan masuk atau keluar dari entitas; dan

- b. Akun atau pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut Bab 2 SAK EMKM poin 19 menyatakan bahwa basis akrual digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan entitas. Akun-akun tersebut diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban jika memenuhi kriteria definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut.

2) Pengukuran

Menurut SAK EMKM bab 2 poin 15 menjelaskan pengukuran sebagai proses penentuan jumlah uang yang digunakan untuk mencatat aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran pada laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur –unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya perolehan historis yang sesuai dengan Bab 2 poin 16. Biaya perolehan historis suatu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk menerima aset pada perolehan. Biaya historis suatu kewajiban adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kasyang harus dibayar untuk memenuhi kewajibannya dalam kegiatan bisnis normal.

3) Penyajian

Bab 3 poin 2 dari SAK EMKM menetapkan bahwa penyajian yang wajar membutuhkan penyajian yang jujur tentang dampak transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria untuk pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan terhadap persyaratan SAK EMKM tidak cukup memadai bagi pengguna untuk memahami dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya pada kondisi keuangan dan kinerja entitas.

Dalam Bab 3 poin 3 menjelaskan tujuan penyajian laporan keuangan entitas dengan benar sebagai berikut:

- a. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.

- b. Representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Akrual Basis

Basis akrual (*accrual basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui terjadinya transaksi meskipun penerimaan kas serta pengeluaran kas belum terjadi atau kas diterima dan dikeluarkan di masa depan. Laporan keuangan yang mengadopsi teknik basis akrual mengakui adanya utang dan piutang.

Berdasarkan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, 2016) laporan keuangan EMKM disusun berdasarkan asumsi akrual. DSAK IAI memutuskan menggunakan asumsi dasar akrual karena konsisten dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan serta asumsi tersebut konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan di standar akuntansi keuangan lainnya. Laporan keuangan yang menggunakan basis akrual juga menghasilkan informasi keuangan yang lebih menggambarkan secara tepat sesuai dengan kondisi dan aktivitas bisnis pada periode tertentu. Menurut Harnanto (1995), dalam metode akrual basis, memiliki beberapa ciri – ciri yaitu:

1. Ada kepastian bahwa seluruh hasil (harga) penjualan dapat direalisasikan (diterima) dalam bentuk kas (uang).
2. Biaya–biaya yang bersangkutan dengan aktivitas penjualan dan merealisasikan hasil penjualan itu dapat ditentukan pada saat (dalam periode) terjadinya transaksi penjualan.

Perbedaan metode akrual basis dan metode kas basis terletak pada pengakuan pendapatan dan biayanya. Untuk metode akrual basis, pendapatan serta biaya diakui pada saat adanya transaksi terjadi. Untuk metode kas basis, pendapatan serta biaya diakui pada saat pendapatan diterima secara kas dan biaya telah dibayarkan. Di dalam masing – masing metode memiliki kelebihan serta kekurangan dijelaskan di tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Akrual Basis dan Kas Basis

Akrual Basis	
Kelebihan	Kekurangan
Informasi lebih akurat, karena setiap transaksi terjadi dilakukan pencatatan	Pengakuan biaya pada saat adanya transaksi mengakibatkan pendapatan berkurang pada saat itu juga
Aset, kewajiban, serta modal dalam perusahaan akan terlihat	
Pendapatan perusahaan bertambah ketika pendapatan sudah dapat diakui ketika adanya transaksi	
Kas Basis	
Kelebihan	Kekurangan
Pengakuan terhadap pendapatan dilakukan ketika pendapatan tersebut sudah benar – benar diterima, sehingga menunjukkan posisi yang sebenarnya	Setiap pengeluaran kas dianggap sebagai beban
Biaya diakui ketika biaya tersebut telah dibayarkan, sehingga mengurangi perhitungan terhadap pendapatan	

Berdasarkan uraian diatas, seberapa luas wawasan pelaku usaha terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat diukur melalui sistem pencatatan keuangannya. Apabila UMKM telah menggunakan metode akrual basis di laporan keuangannya, maka dari itu UMKM dapat dikatakan

telah siap dan mampu untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, sehingga UMKM tersebut lebih mudah dalam menerapkan standar tersebut. Namun, apabila UMKM tersebut belum menerapkan metode akrual basis di laporan keuangannya maka UMKM belum siap dalam memahami wawasan tentang SAK EMKM dikarenakan laporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM tersebut kemungkinan besar masih menggunakan metode basis kas (*cash basis*), sehingga membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu ke basis akrual.

Konsep Entitas Bisnis

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (2016), konsep entitas bisnis ialah pencatatan akuntansi harus dilakukan secara terpisah dengan pencatatan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dipisah secara jelas dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun transaksi dari entitas lainnya.

SAK EMKM menetapkan bahwa konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar. Suatu UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, harus dapat memisahkan antara kekayaan milik pribadi dengan kekayaan serta hasil dari usaha dari UMKM itu sendiri. DSAK IAI menegaskan, apabila suatu entitas tidak memenuhi asumsi dasar konsep entitas bisnis, maka entitas tersebut belum dapat menerapkan SAK EMKM. Sebagai contoh, ketika seseorang atau pemilik melakukan investasi uang di suatu usaha, maka akan dicatat sebagai ekuitas bisnis untuk pemilik. Demikian pula, ketika pemilik mengambil kas atau barang bisnis untuk penggunaan pribadi, tidak diperlakukan sebagai pengeluaran bisnis. Sehingga catatan akuntansi yang dibuat dalam pembukuan dari sudut pandang unit bisnis, bukan pribadi yang memiliki bisnis. Hal ini membantu dalam memastikan keuntungan bisnis, karena hanya pengeluaran dan pendapatan usaha dicatat dan pendapatan serta pengeluaran pribadi diabaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, UMKM dapat dinilai tingkat pengetahuannya tentang laporan keuangan SAK EMKM dari konsep entitas bisnis. Jika UMKM dapat memisahkan harta pribadi dengan harta usaha

berarti wawasan pelaku usaha tersebut telah memahami tentang laporan keuangan SAK EMKM. Apabila UMKM belum memisahkan harta pribadi dengan harta usaha, maka UMKM belum memiliki wawasan tentang SAK EMKM.

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wawasan tentang SAK EMKM

2.4.1. Latar Belakang Pendidikan

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003) mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan ialah sebuah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya misalnya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003) tentang sistem pendidikan nasional, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan informal dan informasi yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal seperti pendidikan keterampilan dan pelatihan, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan pendidikan informal merupakan kegiatan belajar secara mandiri yang di lakukan oleh lingkungan dan keluarga.

Pemilik UMKM sangat dominan dalam menjalankan usaha yang ada di perusahaan. Latar belakang pendidikan pemilik adalah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Indikator tingkat pendidikan (Rudiantoro & Siregar, 2012) yaitu pendidikan yang diperoleh dari pendidikan formal antara lain adalah: Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Diploma dan Sarjana.

2.4.2. Umur Usaha

Umur usaha adalah lamanya waktu yang ditempuh oleh usaha dalam menjalankan usahanya untuk menunjukkan kemampuan bersaingnya. Umur perusahaan merupakan lamanya suatu perusahaan telah berdiri dan menjalankan operasi usahanya yang dapat dinyatakan dalam tahun. Umur usaha merupakan lamanya perusahaan berdiri yang dihitung dari tahun perusahaan berdiri. Indikator untuk mengukur umur usaha menurut penelitian (Rudiantoro & Siregar, 2012) yaitu umur perusahaan diukur berdasarkan waktu (dalam tahun) sejak pendirian perusahaan sampai dengan penelitian dilakukan.

2.4.3. Ukuran Usaha

Ukuran perusahaan dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang, perusahaan besar. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Ukuran usaha yang bisa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap maupun honorer yang terdaftar di dalam perusahaan tersebut.
2. Total utang yaitu jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
3. Total asset, yaitu keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan.

Ukuran usaha yang besar mengindikasikan perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih banyak, termasuk karyawan dengan keahlian khusus yang lebih baik. Sehingga UMKM dengan ukuran yang lebih besar diharapkan mempunyai pemahaman lebih baik mengenai SAK ETAP.

2.4.4. Pemahaman Teknologi

Sebuah perusahaan harus terus meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki atau meningkatkan daya saingnya dan dengan itu perusahaan dapat menjamin kelangsungan pertumbuhan dalam jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap teknologi, baik teknologi

pengembangan produk maupun teknologi pengembangan informasi menjadi salah satu kunci dari pengembangan kapasitasnya (Tambunan, 2009).

Teknologi informasi ini selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk memproses dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki dan bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin manusia tidak mampu melakukannya (Fitriyani, 2014). Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan komputer akan menghasilkan informasi dengan tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman teknologi informasi adalah proses perbuatan atau cara individu dalam memahami pentingnya informasi akuntansi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Sariningtyas & Diah (2011) menyebutkan bahwa dengan dihasilkannya informasi akuntansi yang berkualitas dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha

2.4.5. Sosialisasi dan Pelatihan

(Ritcher dalam Dewi, Yuniarta dan Wahyuni, 2017) mendefinisikan sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diberlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu masyarakat. Rudiantoro dan Siregar (2012) menyebutkan pemahaman terkait SAK EMKM erat kaitannya dengan proses pemberian informasi dan sosialisasi. Apabila pengusaha mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan baik, maka pemahaman terkait SAK EMKM akan menjadi lebih baik dan mendukung proses implementasi SAK EMKM.

Dari sumber-sumber informasi dan sosialisasi yang telah diungkapkan Rudiantoro dan Siregar (2012), maka dapat ditarik indikator dari informasi dan sosialisasi sebagai berikut:

- a. Media, seperti: buku, majalah, koran, media masa.
- b. Seminar atau pelatihan akuntansi
- c. Instansi Pemerintah, seperti Dinas Koperasi UMKM Kab/Kota/Prov.
- d. Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- e. Pelatihan akuntansi dari Lembaga Perguruan Tinggi
- f. Pelatihan akuntansi dari Organisasi, seperti: LSM atau lainnya

2.4.6. Ketidakpastian Lingkungan

Milikan (1987) mendefinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi. Sebuah organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungannya, karena lingkungan disekitar organisasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi koperasi dalam memprediksi secara tepat suatu kondisi lingkungan yang terjadi. Ketidakmampuan koperasi dalam memprediksi kondisi lingkungan secara tepat disebabkan karena pengurus koperasi kurang atau bahkan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai faktor-faktor yang ada disekitar lingkungan koperasi. Menurut Fitriyah (2006) variabel ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel dependennya.

Kondisi ketidakpastian lingkungan digambarkan dengan pengukuran sejauhmana responden dapat memprediksi ketidakpastian lingkungan bisnis yang dihadapi mereka. Indikator ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini mengambil faktor lingkungan eksternal perusahaan yang dipaparkan oleh Pearce dan Robinson (2007), yaitu:

1. Ekonomi
2. Sosial

3. Politik
4. Teknologi
5. Ekologi

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	Sholikin dan Setiawan, 2018	Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno	Penelitian Kualitatif dengan Indikator pada SAK EMKM	Temuan diluar konteks yang diteliti bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAK EMKM
2	Lestari, 2018	Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno	Penelitian Kualitatif dengan Indikator pada SAK EMKM	3 UMKM yang menjadi objek untuk penelitian, tidak memiliki pegawai khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi secara baik dan benar. Alasan dari ketiga UMKM tersebut tidak

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
				melakukan pembukuan akuntansi adalah tidak ada karyawan atau sumber daya manusia yang paham dengan akuntans
3	Mulyaga,2016	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK ETAP pada UMKM	Variabel Dependen: Implementasi SAK ETAP Variabel Independen: Sosialisasi SAK ETAP, Jenjang pendidikan, Skala Usaha, Umur Usaha, Budaya Organisasi	Variabel Sosialisasi SAK ETAP, Jenjang pendidikan, Skala Usaha, Budaya Organisasi berpengaruh positif pada Implementasi SAK ETAP Sedangkan variabel Umur Usaha tidak berpengaruh pada Implementasi SAK ETAP
4	Utomo, 2020	Kesiapan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Penelitian Kualitatif dengan Indikator pada SAK EMKM	Penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM telah menerapkan

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
		Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Studi UMKM Di Kota Pontianak)		pencatatan akuntansi serta sebagian besar sudah melakukan pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha, namun untuk penerapan akrual basis dalam UMKM masih belum dapat diterapkan dikarenakan pemilik UMKM selalu mencatat transaksi ketika menerima dan mengeluarkan kas serta pengetahuan mengenai SAK EMKM sangat minim dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak –pihak yang terkait
5	Anisykurlillah & Rezqika, 2019	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sak Etap Pada Umkm Dengan Ketidakpastian	Variabel Independen: Latar belakang pendidikan, ukuran, umur, sosialisasi,	Semakin tinggi frekuensi sosialisasi dan pelatihan berpengaruh pada implementasi SAK ETAP dan

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
		Lingkungan sebagai Variabel Moderasi	pemahaman teknologi Variabel dependen: Implementasi laporan keuangan Variabel Moderasi: Ketidakpastian lingkungan	ketidakpastian lingkungan dapat digunakan sebagai moderasi karena mampu memperkuat ukuran bisnis, usia bisnis dan pelatihan.
6	Yasa, 2017	Pengaruh Skala Usaha, Umur Perusahaan, Pengetahuan dan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Buleleng Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Permoderasi.	Variabel Independen: Latar belakang pendidikan, ukuran, umur, sosialisasi, pemahaman teknologi Variabel dependen: Implementasi laporan keuangan Variabel Moderasi: Ketidakpastian lingkungan	Pertama Skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Kedua umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Ketiga pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
7	Destiana, dkk., 2016	Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, Budaya Perusahaan dan Umur Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UKM dengan Ketidakpastain Lingkungan sebagai pemoderasi	Variabel Dependen: Penggunaan informasi keungan Variabel Independen: Pendidikan Pemilik, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, Budaya Perusahaan, Umur Usaha Variabel Moderasi: Ketidakpastian lingkungan	Pendidikan pemilik, pengetahuan akuntansi, berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan budaya organisasi dan umur usaha tidak berpengaruh. Variabel ketidakpastian lingkungan memoderasi semua variabel independen terhadap variabel dependen
8	Sitoresmi dan Fuad, 2013	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah	Variabel Dependen: Penggunaan informasi keungan Variabel Independen: Pendidikan Pemilik, Skala usaha, Umur perusahaan, Pelatihan	Semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen Ketidakpastian lingkungan tidak memoderasi atau tidak memperkuat hubungan variabel

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
			akuntansi Variabel Moderasi: Ketidakpastian lingkungan	independen terhadap variabel dependen

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Hubungan Latar Belakang Pendidikan dan Wawasan tentang SAK EMKM

Teori human capital menyatakan bahwa pendidikan menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas belajarnya. Oleh karena itu, pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan menjadi sinyal kemampuan (Zahro & Wahyundaru, 2015). Pendidikan formal pemilik akan mempengaruhi pengetahuan tentang akuntansi, karena materi akuntansi diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, oleh karena itu terutama ketika seseorang mempelajari profesi akuntansi untuk memperoleh pengetahuan akuntansi yang lebih tinggi. Menurut (Gray, Adams, Gonzalez, Adams dan McNeholas, 2010), pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan menyerap pengetahuan baru (termasuk kemampuan memperoleh, menyerap, mentransformasikan, dan memanfaatkan pengetahuan baru).

Penelitian yang dilakukan Mulyaga (2016); Anisykurlillah & Rezqika (2019); dan Utomo (2020) menyatakan jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha terkait SAK EMKM dan penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Variabel latar belakang pendidikan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

2.6.2. Hubungan Ukuran Usaha dan Wawasan Tentang SAK EMKM

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang sulit dipisahkan dari lingkungan kewirausahaan UMKM. Ukuran perusahaan dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang, perusahaan besar. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Perusahaan besar berarti perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih mampu mempekerjakan karyawan dengan keterampilan yang lebih baik. Menurut Gray et al. (2010), semakin besar perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang dimiliki dan semakin mampu mempekerjakan karyawan dengan keterampilan yang lebih baik untuk mendukung penerapan SAK EMKM.

Rudiantoro & Siregar (2012) menemukan bahwa ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya.

Penelitian yang dilakukan Anisykurlillah & Rezaqika (2019); Yasa (2017); dan Destiana dkk. (2016) menemukan bahwa skala usaha dapat berpengaruh terhadap implemmentasi SAK EMKM pada UMKM, karena skala usaha yang semakin besar berimplikasi perusahaan tersebut mempunyai sumber daya atau fasilitas yang mendukung seperti dapat mempekerjakan tenaga kerja dengan keahlian akuntansi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H2: Variabel ukuran usaha (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

2.6.3. Hubungan Umur Usaha dan Wawasan tentang SAK EMKM

Umur perusahaan diukur berdasarkan waktu (dalam tahun) sejak pendirian perusahaan sampai dengan penelitian dilakukan (Rudiantoro & Siregar, 2012). Untuk jangka waktu yang lama Usia bisnis memungkinkan pengusaha untuk memprioritaskan laporan keuangan, atau bahkan mengabaikannya. Lamanya waktu mendirikan bisnis menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan bank untuk mengevaluasi usahanya, karena mulai dari usia bisnis, Anda dapat melihat tahapan bisnis dari bisnis dan rekam jejak pelanggan. Bisnis yang telah dijalankan selama ini. Karena kepribadian pemilik, motivasi dan persepsi pemilik akan pentingnya pelaporan keuangan, usia bisnis tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah berdiri 10 tahun atau kurang akan memberikan informasi akuntansi statutori, informasi akuntansi anggaran, dan informasi akuntansi lainnya untuk pengambilan keputusan dibandingkan dengan perusahaan yang telah berdiri selama 11 sampai 20 tahun. . Studi tersebut juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan perusahaan lama, sejumlah besar informasi akuntansi untuk tujuan pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan Sitoroesmi dan Fuad (2013); Mulyaga (2016); Anisykurlillah & Rezaqika (2019); dan Utomo (2020) mengatakan bahwa eksistensi bisnis lebih diutamakan oleh pemilik usaha dibanding dengan perkembangan bisnisnya, maka umur usaha tidak berpengaruh positif terhadap kebutuhan SAK EMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H3: Variabel umur usaha (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

2.6.4. Hubungan Pemahaman Teknologi dan Wawasan tentang SAK EMKM

Pemahaman dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap pentingnya teknologi informasi akuntansi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena informasi akuntansi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Tambunan (2009) menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus meningkatkan kapasitasnya secara terus menerus untuk memperbaiki atau meningkatkan daya saingnya serta dapat menjamin kelangsungan pertumbuhan perusahaan tersebut dalam waktu jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap teknologi pengembangan produk maupun teknologi pengembangan informasi menjadi salah satu kunci dari pengembangan kapasitasnya.

Rustam, (2016) Rudiantoro & Siregar (2011) menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi semakin tinggi maka meningkatkan penerapan SAK ETAP. Upaya untuk memahami teknologi informasi yang baru maka pandangan para pelaku UMKM terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi dalam kehidupan bisnis akan semakin luas serta dapat mendorong percepatan penyediaan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sariningtyas & Diah (2011) mengungkapkan bahwa pemahaman teknologi yang tinggi mempunyai kemungkinan para pelaku UMKM untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif.

Penelitian yang dilakukan Sitoresmi dan Fuad (2013); Mulyaga (2016); Anisykurlillah & Rezqika (2019); dan Utomo (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman teknologi informasi oleh pemilik UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seorang pemilik UMKM yang mempunyai pemahaman teknologi informasi yang lebih baik cenderung menginginkan untuk memperluas wawasan tentang laporan keuangan SAK ETAP yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H4: Variabel pemahaman teknologi (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap Wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

2.6.5. Hubungan Sosialisasi dan Pelatihan dan Wawasan tentang SAK EMKM

(Ritcher dalam dewi, Yuniarta dan Wahyuni, 2017) mendefinisikan sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diberlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu masyarakat. Sosialisasi yang diterima pemilik UMKM merupakan pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi persepsi pemilik UMKM untuk menerapkan SAK ETAP. Sosialisasi dan pelatihan yang dijalankan jelas sangat berpengaruh pada pemahaman dan kemauan pelaku UMKM dalam menerapkan SAK ETAP.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau lembaga lainnya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai SAK ETAP kepada para pelaku UMKM. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak eksternal dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan memotivasi para pemilik atau manajer UMKM dalam memahami SAK ETAP dengan lebih baik. Pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP juga menjadi pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi persepsi pemilik UMKM terkait pentingnya menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan bisnisnya.

Dalam proses sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai SAK ETAP memang diperlukan adanya kontinuitas dan konsistensi untuk mensosialisasikan SAK ETAP ke seluruh pihak terkait secara menyeluruh di seluruh Indonesia, baik dilakukan oleh IAI yang telah membuat standar tersebut maupun secara kerjasama dengan institusi lainnya. Penelitian Firmansyah (2013) dan Solovida (2003) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada usaha

kecil. Pelatihan berhubungan positif terhadap penyediaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam perusahaan kecil.

Penelitian yang dilakukan Anisykurlillah & Rezaqika (2019); Yasa (2017); dan Destiana dkk. (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM. Semakin tinggi sosialisasi SAK ETAP yang diperoleh para pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula wawasan mengenai SAK ETAP pada UMKM. Pemberian informasi dan sosialisasi yang diterima oleh para pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap wawasan mengenai SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H5: Variabel sosialisasi dan pelatihan (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap Wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

2.6.6. Hubungan Moderasi Ketidakpastian Lingkungan pada Wawasan tentang SAK EMKM

Skala usaha yang dimiliki UMKM akan berdampak pada wawasan tentang SAK EMKM, dan ketidakpastian lingkungan dapat terjadi. SAK EMKM dapat digunakan sebagai soft technology sebagai sistem untuk lebih mengurangi risiko yang mungkin terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Kompleksitas kegiatan operasional suatu perusahaan berbanding lurus dengan skala usaha perusahaan, sehingga semakin besar skala usaha UMKM maka semakin besar pula risiko ketidakpastian lingkungan. Kemudian ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dengan wawasan tentang laporan keuangan SAK EMKM pada UMKM.

Usia bisnis menentukan mentalitas perusahaan untuk bertindak ketika menjalankan bisnis perusahaan. Usia bisnis menentukan kematangan keputusan pemilik. Semakin lama suatu perusahaan berdiri, kebutuhan akan penggunaan informasi akuntansi akan dipengaruhi oleh perubahan

lingkungan bisnisnya. Hal ini disebabkan permasalahan yang dihadapi UMKM semakin kompleks. Tidak hanya itu, semakin lama perusahaan berdiri, semakin banyak pula persiapan yang perlu dilakukan dalam menghadapi persaingan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan lebih banyak usaha. Pengetahuan tentang laporan keuangan berdasar SAK EMKM dapat digunakan sebagai soft technology sebagai sistem untuk lebih mengurangi risiko yang mungkin terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Kompleksitas kegiatan operasional perusahaan berbanding lurus dengan usia usaha, sehingga semakin lama umur UMKM maka risiko ketidakpastian lingkungan semakin besar. Kemudian ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi hubungan antara umur perusahaan dengan wawasan tentang SAK EMKM pada UMKM.

Pemahaman pribadi adalah pemahaman terhadap seluruh kepribadian termasuk semua latar belakang dan interaksinya dengan lingkungan (Sariningtyas & Diah, 2011). Pemahaman yang lebih baik tentang teknologi yang diterapkan UMKM akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi mengatasi ketidakpastian lingkungan yang dihadapi UMKM dalam mencapai tujuan bisnis. Hal ini didasarkan pada poin UTAUT bahwa salah satu faktor penentu pengguna teknologi informasi adalah ekspektasi upaya (ekspektasi upaya), yaitu tingkat kenyamanan yang dirasakan seseorang saat menggunakan sistem. Semakin banyak peserta UMKM yang memiliki pemahaman tentang teknologi informasi, maka semakin mudah mengatasi ketidakpastian dan memberikan kontribusi nyata bagi implementasi SAK EMKM MAK. Kemudian ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi hubungan antara pemahaman teknis dengan wawasan tentang laporan keuangan SAK EMKM di UMKM.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6a: Variabel (Z) ketidakpastian lingkungan memoderasi ukuran usaha terhadap wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

H6b: Variabel (Z) ketidakpastian lingkungan memoderasi umur usaha terhadap wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

H6c: Variabel (Z) ketidakpastian lingkungan memoderasi pemahaman teknologi terhadap Wawasan tentang Laporan Keuangan berdasar SAK EMKM (Y).

2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasar uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi wawasan tentang laporan keuangan berdasar SAK EMKM. Hubungan faktor-faktor tersebut digambarkan dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

